

DAFTAR PUSTAKA

- Akib, Haedar. 2010. Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*. Volume 1 No. 1. Universitas Negeri Makassar.
- Al Amin, Muhammad, Slamet Riadi & Didi. 2020. *Hasil Penelitian Koalisi Save Spermonde*. "Panraki Pa'boya-Boyangang: Oligarki Proyek Strategis Nasional dan Kerusakan Laut Spermonde. Hasil Riset/Investigasi Dampak Aktivitas Tambang Pasir Laut PT Royal Boskalis, PT Alefu Karya Makmur, dan PT Banteng Laut Indonesia Terhadap Wilayah Tangkap dan Kehidupan Masyarakat Kodingareng di Perairan Spermonde".
- Ali, Muhammad. 2020. Relasi Aktor dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Mengengah di Kota Mataram. *LIPA-The Indonesian Journal of Public Administration*. Volume 6 No. 1, Juni 2020.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak.
- Aresel, Murat. Ekologi Politik Dimana Ekonominya ?. *Jurnal Tanah Air*. Edisi Oktober-Desember 2009. International Institute of Social Studies.
- Arifin, Zainal. Politik Ekologi: Ramah Lingkungan sebagai Pembenaran. *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan*. Nomor I Volume I Tahun 2012 : 12.
- Arsad, Mohamad Rahawarin. 2019. Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik di Kantor Camat Teluk Waru Kabupaten Seram Bagian Timur. *e-jurnal.ukim.ac.id*. Universitas Pattimura Ambon.
- Asrul. 2019. Sulselsatu.com. *Kecamatan Kepulauan Sangkarrang Kini Punya Infrastruktur Baru*, (Online), (<https://www.sulselsatu.com/2019/06/08/berita-utama/kecamatan-kepulauan-sangkarrang-kini-punya-infrastruktur-baru.html>) diakses pada Selasa, 01 Juni 2021.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 2019. *Dokumen Rencana Investasi Jangka Menengah Kota Makassar 2019-2023*. (Online). (https://sipba.ciptakarya.pu.go.id/sipba_online/ws_file/dokumen/rpi2jm/DOCRPIJM_1561426176BAB_II_PROFIL_KOTA_MAKASSAR.pdf), diakses pada Selasa, 01 Juni 2021, pukul 13:02 WITA.

Badan Pusat Statistik Kota Makassar. *Kecamatan Kepulauan Sangkarrang dalam Angka, Kepulauan Sangkarrang Subdistrict in Figures 2021*. (<https://makassarkota.bps.go.id/Publikasi>), diakses pada 15 Januari 2022.

Boskalis. *Company Profile*. (<https://boskalis.com/about-us/company-profile.html>), diakses pada 19 Januari 2022.

Chandra, Wahyu. Mongabay. 2017. *Dari Diskusi Mongabay Mengkritisi Draft Perda Zonasi Pesisir Sulsel*, (Online), (<https://www.mongabay.co.id/2017/07/03/dari-diskusi-mongabay-mengkritisi-draft-perda-zonasi-pesisir-sulsel/>), diakses pada 10 Februari 2022.

_____ Sarat Masalah Aktivis Minta Pembahasan RZWP3K Sulsel Ditunda, (Online), (<https://www.mongabay.co.id/2017/06/12/sarat-masalah-aktivis-minta-pembahasan-rzwp3k-sulsel-ditunda/>), diakses pada 10 Februari 2022.

_____ Ternyata Banyak Masalah dalam Raperda Zonasi Pesisir di Sulsel Apa Saja?, (Online), (<https://www.mongabay.co.id/2017/08/25/ternyata-banyak-masalah-dalam-raperda-zonasi-pesisir-di-sulsel-apa-saja/>), diakses pada 14 Februari 2022.

Daiyabu, Muhammad Hassan and Abdulrahman Dangana Lukman. 2020. The Significance of Political Theory in Contemporary Political Discourse: Nature, Functions and Dynamics. *African Scholar Journal of Humanities and Social Sciences (JHSS-6)*. African Scholar Publications & Research International. Volume 17 No. 6. ISSN: 2110-2086. p. 39-66.

Dewi. *Pendekatan Top-Down Versus Bottom-Up: Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Makalah. IAN-UNY. Diakses pada Sabtu, 03 April 2021.

(<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:4iF2NJPpCj4J:staffnew.uny.ac.id/upload/197712152010122002/pendidikan/PENDEKATAN%2BTOP%2BDOWN%2BVERSUS%2BBOTTOM%2BUP.pdf+&cd=3&hl=en&ct=clnk&gl=id>).

Dinas Kelautan dan Perikanan, wawancara, 2022.

Dokumen UNCLOS dalam website kkp.go.id, diakses pada 02 April 2022.

Fitrah, Muh. Dan Luthfiyah. 2017. *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. Sukabumi: CV Jejak.

Gunung Sitoli Kota.go.id, (Online), Sosialisasi Perda No.4 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sumatera Utara di Kepulauan Nias, (<https://gunungsitolikota.go.id/2019/07/sosialisasi-perda-no-4-tahun-2019-tentang-rencana-zonasi-wilayah-pesisir-dan-pulau-pulau-kecil-provinsi-sumatera-utara-di-kepulauan-nias/>), diakses pada 10 Februari 2022.

Hayat. 2018. *Buku Kebijakan Publik*. Universitas Islam Malang. (Online) Uploaded on(<https://www.researchgate.net/publication/335788910>).

Hadiyanti, Heny. 2020. *Implementasi Kebijakan Tentang Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Kabupaten Bandung Barat*. Tesis. Universitas Pasundan Bandung.

Hidayat, Hikmat. 2019. *Analisis Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Pada Pengelolaan Limbah Kulit dalam Konsep Politik Lingkungan di Kota Tasikmalaya*. Tesis. Universitas Siliwangi.

Hijr Ismail, Kepala Bagian Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, wawancara 11 Januari 2022.

Henriyani, Etih. 2015. Problematika dalam Implementasi Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Moderat*. Volume.1 No.4 November.

Husni, M Tamrin. 2017. Interaksi Aktor Kebijakan dalam Pengelolaan Wilayah Jembatan Suramadu dalam Perspektif *Advocacy Coalition Framework* (ACF). *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*. Vol. 5 No. 2 September.

Hoffman, John. 2007. *A Glossary of Political Theory*. Edinburgh University Press.

Kaltara Antara News. (Online), DKP Gencar Sosialisasikan Perda RZWP3, 26 Oktober 2018, (<https://kaltara.antarane.ws.com/berita/450972/dkp-gencar-sosialisasikan-perda-rzwp3>), diakses pada 10 Februari 2022.

Koalisi Selamatkan Laut Indonesia & Aliansi Selamatkan Peisisir. *Hentikan Tindakan Intimidatif Polairud terhadap Masyarakat Pulau Kodingareng*, (Online), (<https://kontras.org/2020/09/28/hentikan-tindakan-intimidatif-polairud-terhadap-masyarakat-pulau-kodingareng/>), diakses pada 13 Agustus 2021.

Makassar New Port. *Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas*, (Online), (<https://kppip.go.id/en/national-strategic-projects/h-new-seaport-development-project-and-capacity-development/makassar-new-port/>), diakses pada 18 Januari 2022.

Makassar New Port. *Public Profile*, (Online), (<https://mksnewport.co.id/public/profile>), diakses pada 18 Januari 2022.

Muin, Ashrawi. 2020. IDN Times Sulsel. *Didesak Cabut Izin Tambang Laut, Nurdin: Apa yang Dilanggar?*, (Online), (<https://sulsel.idntimes.com/news/sulsel/ashrawi-muin/didesak-cabut-izin-tambang-pasir-laut-nurdin-apa-yang-dilanggar/3>) diakses 23 September 2020.

Marta, Auradian dan Leo Agustino. 2019. Analisis Policy Networks: Utilitas dan Limitasi. *Jurnal Agregasi: Jurnal Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi*. Vol. 7 No. 1 Mei.

Mariane, Ine. 2018. *Jejaring Kebijakan Implementasi MPMBS*. Yogyakarta: Pandiva Buku.

Muhammad Al Amin, Direktur Eksekutif Walhi Sulsel, wawancara 5 Juli 2021.

- Nalefo, La. 2020. *Dinamika Pengelolaan sumberdaya Pesisir Berbasis Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish.
- Nawa, Jamil. 2020. *Brisik.id. Pelesiran ke Kodingareng Lompo. Makassar, (Online)*, (<https://brisik.id/read/54185/pelesiran-ke-kodingareng-lompo-makassar>) Diakses pada 15 Januari 2022.
- Om Cappa, Divisi Tanah dan Lingkungan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar, *wawancara* 2022.
- Paserkab.go.id*. Bupati Fahmi Buka Sosialisasi Perda RZWP3K Kaltim, (Online), (<https://paserkab.go.id/berita/humas/bupati-fahmi-buka-sosialisasi-perda-rzwp3k-kaltim>), diakses pada 10 Februari 2022
- Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kecamatan Kepulauan Sangkarrang*
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 23/Permen-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil*
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil*
- Peta Alokasi Ruang RZWP3K Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
- Puguh, Yitno Martomo. 2020. *Actor Networks Theory Formulasi Kebijakan Penanganan Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT) guna Mendukung Pariwisata Kota Surakarta*. Proceeding SENDIU 2020. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Surakarta. Unisbank.ac.id.
- Ramadan, Sahrul. 2020. *IDN Times Sulsel. Wansus Direktur WALHI Sulsel Tambang pasir Laut Jadi Konflik Ruang, (Online)*, (<https://sulsel.idntimes.com/news/sulsel/sahrul-ramadan-1/wansus-direktur-walhi-sulsel-tambang-pasir-laut-jadi-konflik-ruang>) diakses 23 September 2020.

- Ramdhan, Moh. Pomanto. Maret 2021. Pemerintah Kota Makassar.
Makassar Recover 2021 – Inovasi Penanggulangan Pandemi Covid-19 Kota Makassar. (Online).
<http://makassarkota.go.id/recover/BUKU.pdf>), diakses pada
 Selasa, 01 Juni 2021.
- Rasyid, Ilham dan Jessica Roma. 2020. Gerakan Earth Hour Tangerang Dalam Perspektif Politik Lingkungan. *International Journal of Demos*. Vol. 2 Issue 2, Agustus.
- Rivai, S. Rudy & Iwan S. Anugrah. 2011. Konsep dan Implementasi Pembangunan Pertanian Berkelanjutan di Indonesia. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*. Volume 29 Nomor 1, Juli.
- Robert A. Baron. 1991. Positive effects of conflict: A cognitive perspective. *Employee Responsibilities and Rights Journal* . 4 (1).
- Ristyningrum, Andini. Bisnis Sulawesi. (2020). *MNP Disebut Proyek Destruktif Pesisir Sulsel, Ini Sanggahan Pelindo IV*. (Online).
<https://sulawesi.bisnis.com/read/20200707/540/1262937/mnp-disebut-proyek-destruktif-pesisir-sulsel-ini-sanggahan-pelindo-iv>
- Rukajat, Ajat. 2018. *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*. Yogyakarta: Deepublish.
- Suardi, Wahdania dan Suswanta. 2020. *Advocacy Coalition Framework Dalam Tata Kelola Perkotaan Berbasis Ruang Terbuka Hijau di Kota Makassar*. Publik Jurnal Ilmu Administrasi. Vol. 2 No. 9 Desember.
- Sulfitra, Mirajanna, Saputra, Haidar, Ihsan, Arsenio, Riyadi, Akram, Haq, & Anas. 2019. *Catatan Akhir Tahun Walhi Sulsel: Degradasi Lingkungan dan Bencana Ekologis di Sulawesi Selatan*. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Sulawesi Selatan.
- Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Gramedia: Jakarta.
- Tamti, Hartati, Ratnawati dan Asni Aswar. Kondisi Sumberdaya Alam dan Masyarakat Pulau di Kota Makassar: Studi Kasus Pulau Kodingareng dan Pulau Barangcaddi. *Jurnal Garuda Ristekdikti*. Volume 3 Nomor 1, Juni 2014.

- Taufiqurokhman. 2014. *Kebijakan Publik: Pendelegasian Tanggung Jawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintah*. FISIP Universitas Moestopo Beragama: Jakarta Pusat.
- Tressa, Roma. 2018. Policy Network dalam Kebijakan Kontra Radikalisme di Kabupaten Poso. *Jurnal Ilmiah Administratie*. Vol. 11 No. 1 Edisi September.
- Utami, Sri Gayatri, dkk. 2018. Aktor dan Konfigurasi Subsistem dalam Perubahan Kebijakan Pengolahan Sampah Menjadi Listrik di Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Populasi*. Volume 26 Nomor 2.
- Walhi. (2021). *Reklamasi Makassar New Port Menyengsarakan Masyarakat Nelayan Kodingareng*. Siaran Pers.
(<https://www.walhi.or.id/reklamasi-makassar-new-port-menyengsarakan-masyarakat-nelayan-kodingareng>)
- Widodo, Joko. 2021. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Cet.ke-12. Malang: Media Nusa Creative.